

ASIMILASI PERKAWINAN ETNIS CINA DENGAN PRIBUMI DI JAWA: FOKUS STUDI DI JEMBER SITUBONDO DAN TULUNGAGUNG

Retno Winarni

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37, Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Email:retnowinarni122@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan tentang asimilasi perkawinan antara orang-orang Cina dengan orang pribumi. Bagaimana pasang surut asimilasi perkawinan antara orang-orang Cina dengan pribumi dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan antaretnis. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode historis yang meliputi heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa asimilasi perkawinan terjadi sejak orang-orang Cina perantau memutuskan untuk tinggal dalam waktu lama di Indonesia, tetapi pada akhir abad ke-18 awal abad ke-19, asimilasi perkawinan cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan sudah semakin banyaknya perempuan-perempuan asli Cina yang pergi ke Indonesia (Jawa), sehingga banyak Cina peranakan yang kawin dengan perempuan Cina asli, tetapi bukan berarti asimilasi itu hilang sama sekali. Asimilasi perkawinan ini mulai banyak terjadi sejak era ORBA, anjuran pemerintah untuk asimilasi berpengaruh terhadap asimilasi perkawinan. Dampak dari asimilasi perkawinan ini adalah pembauran tradisi dan budaya karena bersatunya dua etnis dalam satu keluarga.

Kata kunci: *Asimilasi, asimilasi perkawinan, etnis Cina, etnis pribumi dan asimilasi budaya*

THE ASSIMILATION OF MARRIAGE BETWEEN CHINESE ETHNICS AND INDIGENOUS PEOPLE IN JAVA: THE STUDI FOCUSED IN JEMBER SITUBONDO AND TULUNGAGUNG

Abstract

This article discusses marital assimilation between Chinese and indigenous people. The research questions are: how was the up and down of marital assimilation between the Chinese and indigenous people? what were the impacts among the ethnics. The research uses history method, these are : heuristics, critics, interpretation and historiography. The result of research shows that marital assimilation happened since the Chinese people decided to stay longer in Indonesia. However at the end of 18th century, the marital assimilation decreased. It was triggered by many Chinese women who arrived in Java. Therefore many peranakans Chinese got married with the indigenous Chinese women. Yet it did not mean assimilation was no longer in existence. The marital assimilation was executed again in the era of New Order. The wisdom of government affected the marital assimilation. The impact of the assimilation is the mixing of culture and tradition because of the unity of two ethnicities in one family.

Keywords: *assimilation, marital assimilation, Chinese ethnicity, indigenous people, cultural assimilation*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan antaretnis sebagai bagian dari asimilasi merupakan penyatuan beragam kelompok etnik yang berbeda secara biologis. Robert Schoen seperti dikutip oleh Abdullah Idi (2009:130), mengatakan bahwa perkawinan antaretnis yang berbeda merupakan indikasi utama dari kekuatan batasan-batasan kelompok itu, sekaligus hakikat hubungan sosial antara mereka. Hal itu secara simultan kadang kala dipandang sebagai suatu ancaman terhadap ciri-ciri suatu kelompok etnis minoritas.

Etnis Cina di Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya telah lama usia tinggalnya. Hubungan dagang antara negeri Cina dengan nusantara telah terjalin sejak zaman klasik.

Volume perdagangan semakin besar ketika nusantara memasuki zaman kurun niaga abad ke-15 sampai abad ke-17. Hubungan dagang yang semakin intensif ini memungkinkan terjadinya migrasi besar-besaran orang-orang Cina ke tanah Jawa. Mereka awalnya menetap di kota-kota pelabuhan atau pantai dan dalam masa selanjutnya ada yang tinggal di kota pedalaman seperti di Tulungagung dan Jember. Kehidupan menetap ini kemudian membentuk komunitas-komunitas etnis yang hidup di Pecinan. Mereka tidak hanya menjalin hubungan dengan sesama etnis, tetapi juga menjalin hubungan dengan etnis lain (Reid, 1992). Hubungan inilah yang menyebabkan etnis Cina kemudian beradaptasi dengan cara hidup dan tradisi etnis pribumi.

Perkawinan antara orang Cina dengan pribumi tidak terlepas dari konteks historis perkawinan orang Cina dengan orang Jawa atau Madura. Beberapa informan mengatakan bahwa perkawinan antara orang-orang Cina dengan pribumi sudah berlangsung lama, atau terjadi pada masa-masa lalu. Salah satu sumber menunjukkan bahwa para pembesar Jawa mengambil wanita-wanita Cina peranakan sebagai selir mereka (Remmelink, 2002:12), dan sebaliknya para bupati Cina dari Pesisir utara Jawa menikahi perempuan-perempuan pribumi anak-anak para bangsawan Jawa atau Madura (Remmelink, 2002:13, Wijayanti, 2001:216). Kalangan masyarakat biasa tidak luput juga dari tren ini. Mereka orang-orang Cina yang datang tanpa istri, kemudian memutuskan menikah dengan perempuan pribumi, baik Jawa maupun Madura. Perkawinan ini melahirkan Cina peranakan, yang secara fisik merupakan campuran dan nantinya dididik dengan budaya campuran juga. Proses ini jika dilihat secara historis mengalami pasang surut, adakalanya kecenderungan kawin campur terjadi, tetapi ada saatnya mengalami penurunan secara kuantitas terutama ketika telah mulai berdatangan perempuan-perempuan Cina asli pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Selain itu juga karena pemerintah Belanda yang berusaha memisahkan antara etnis satu dengan yang lain, yang akhirnya berdampak pada menurunnya kuantitas perkawinan antar etnis.

Perkawinan antar etnis boleh dibilang mengalami penurunan, tetapi proses alamiah ini tidak berhenti secara mutlak. Pergaulan yang lebih sering antara etnis Cina dengan pribumi sering menimbulkan tidak hanya asimilasi bidang budaya dan bahasa, tetapi juga asimilasi perkawinan. Dari masa kemasa asimilasi perkawinan tetap terjadi. Artikel ini membahas tentang asimilasi perkawinan antara orang Cina dengan pribumi, yang akan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan (1) sejak kapan terjadi perkawinan antara orang-orang Cina dengan pribumi; (2) bagaimana perkembangan asimilasi perkawinan dari waktu ke waktu; (3) mengapa asimilasi perkawinan mengalami pasang surut dan (4) apa dampak dari asimilasi perkawinan tersebut.

II. KISAH ASIMILASI PERKAWINAN DIMASA LALU

Pembentukan keluarga merupakan perwujudan dari suatu perkawinan. Hariyono memberikan pengertian tentang perkawinan campur sebagai berikut: “Kalau perkawinan itu berlangsung antara individu dari kelompok etnis yang berbeda, maka lazim disebut dengan perkawinan campur atau istilah asingnya *amalgamation*” (Hariyono, 1994:102). Peristiwa ini dapat dilacak pada zaman akhir Majapahit yaitu kisah tentang pendiri Kerajaan Demak.

Pate Rodim atau Raden Patah, disebut-sebut oleh sebagian orang sebagai cucu Angka Wijaya atau Batara Brawijaya (v) dari Majapahit. Ayah Pate Rodim bernama Arya Damar, seorang Pangeran di Palembang, Sumatra, yang merupakan anak dari Angka Wijaya. Arya Damar menikahi seorang Putri Cina dari Champa, yang sebelumnya merupakan istri dari ayahnya. Sang ayah menyerahkan putri ini kepadanya pada saat ia sedang hamil. Arya Damar dan Putri Champa memiliki dua putra yaitu Raden Patah dan Raden Husen. Keduanya

kemudian dikirim oleh Arya Damar ke Majapahit, kerajaan kakek mereka, namun setelah dewasa Raden Patah menolak tinggal di Majapahit. Ia pun mendirikan Demak, dan kemudian mendeklarasikan perang melawan ayah yang sekaligus kakeknya sendiri, yang berakhir dengan kekalahan pihak Majapahit, tahun 1475, dan Raden Patah (Adipati Jin Bun) menjadi penguasa pertama Demak (Tom Pires, 2014: 259).

Ulasan tersebut memang memuat kisah (mitos dan fakta) tentang riwayat Raden Patah pendiri Kerajaan Demak dan bagaimana peralihan kekuasaan dari Kerajaan Majapahit ke Kerajaan Demak, namun dari ulasan tersebut bisa dikatakan bahwa perkawinan antara orang pribumi (Jawa) dengan orang Cina pada zaman Majapahit sudah berlangsung. Perkawinan silang yang terjadi di keluarga kelas atas ini hanya sebagai salah satu contoh bahwa perkawinan silang bukan merupakan hal tabu. Jika perkawinan silang ini sudah terjadi dalam keluarga elite, dapat diduga bahwa perkawinan silang ini juga terjadi pada masyarakat kebanyakan (masyarakat biasa), karena seperti disebutkan dalam berbagai literatur bahwa pada zaman Majapahit sudah ada komunitas Cina di kerajaan ini.

Hubungan perkawinan silang merupakan salah satu relasi utama antara warga Lasem untuk membangun harmoni antara warga di kota ini. Perkawinan silang antara orang Cina dengan penduduk Jawa, telah terjadi di Kabupaten Lasem, seiring dengan perkembangan pemukiman Cina di Binangun. Di daerah sebelah timur Lasem ini, pada pertengahan abad XV berkembang pemukiman orang Cina dari Campa yang diawali oleh Bi Nang Un. Menurut catatan Akrom Unjiya, penduduk Lasem mempercayai bahwa Bi Nang Un merupakan pengikut Laksamana Cheng Ho yang kemudian menetap di Lasem. Bi Nang Un kemudian mempunyai putri bernama Bi Nang Ti, yang kemudian menjadi istri dari Pangeran Badranala (Adipati Lasem). Pada zaman Bi Nang Un inilah, orang-orang Cina mulai mendapat tempat di kerajaan Lasem, yang merupakan bagian dari wilayah Majapahit (Aziz, M, 2014: 90).

Pada zaman Mataram, raja sering mendapatkan selir-selir dari berbagai wilayah dan semua golongan termasuk wanita Cina (Remmelink, 2002:12). Pernikahan antaretnis juga dilakukan oleh para bupati. Adipati Pesisir Barat, Adipati Jayaningrat yang Cina peranakan menikah dengan satu-satunya putri sah Patih Danureja (Remmelink, 2002:13). Perkawinan antara etnis Cina dengan pribumi juga dilakukan oleh keluarga Tjoa dari Surabaya. Keluarga Tjoa adalah keluarga yang lebih dari 200 tahun tinggal di Surabaya. Tjoa pertama yang datang ke Jawa, Tjoa Kwie Soe, yang tiba di Surabaya pada tahun 1753. Jika tahun kedatangannya akurat, maka pada waktu itu ia baru berumur 13 tahun. Pada waktu itu Surabaya diperintah oleh dua orang bupati, yaitu bupati Kasepuhan dan Kanoman, kakak beradik anak Tumenggung Onggojoyo. Keduanya sering berperang. Tumenggung Onggojoyo juga memiliki seorang anak perempuan, bernama Nyai Roro Kinjeng. Pada tahun 1758 kedua bupati itu kembali berperang. Hal itu memaksa Nyai Roro Kinjeng melarikan diri karena diburu oleh para serdadu. Ia bersembunyi di kapal Tjoa Kwie Soe. Peristiwa itu berakhir dengan perkawinan antara Tjoa Kwie Soe dengan Nyai Roro Kinjeng. Pasangan itulah yang kemudian menjadi leluhur sebuah keluarga Cina terkenal di Surabaya hingga sekarang. Perkawinan itu membuat Tjoa Kwie Soe menjadi seorang pedagang kaya, sebab sebagai ipar bupati Surabaya, ia mendapat hak istimewa dan memegang beberapa *pacht* dari VOC (Onghokham, 2009: 63).

Perkawinan antara etnis Cina dengan pribumi juga dilakukan oleh keluarga Han, yang kemudian menjadi penguasa di Besuki dan Panarukan. Penguasa-penguasa Cina di Besuki dan Panarukan (abad ke-18) ini mayoritas adalah etnis Cina kelahiran lokal. Mereka sebagian besar memeluk Islam dan menikah dengan perempuan pribumi. Kawin campur atau amalgamasi sendiri sudah lama dilakukan oleh orang-orang Cina di Kabupaten Jember. Bupati Puger Kyai Tumenggung Suro Adiwikromo (Nama Cina: Babah Midun, 1795-1801),

menikahi putri Sultan Sumenep. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika Tombe berkunjung ke Besuki, ia hanya diterima oleh patihnya sebab bupati sedang dalam perjalanan ke Sumenep untuk bertemu mertuanya, Bupati Sumenep, Natakusuma (Wijayanti, 2001:216). Hal serupa juga dilakukan oleh perantau-perantau Cina yang lain.

Kawin campur ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan elite Cina atau pribumi, tetapi masyarakat Cina dari strata bawah (orang biasa), yaitu pendatang-pendatang dari negeri Cina dengan perempuan-perempuan pribumi. VOC sebenarnya berupaya agar bermacam-macam bangsa yang hidup di Jawa tetap hidup terpisah antara satu dengan yang lainnya. Upaya ini diwujudkan dalam kebijakan VOC pada 1717 dan 1766 yang secara terang-terangan mengeluarkan peraturan yang melarang berlangsungnya perkawinan campur antara orang Cina dengan orang di luar kelompok mereka, terutama dengan penduduk pribumi (Afif, 2012:55), tetapi yang terjadi pada waktu itu perkawinan-perkawinan antar kelompok masyarakat telah berlangsung dengan secara meluas dan pengidentifikasian dengan kultur Jawa Islam telah merupakan norma di kalangan orang-orang Cina Peranakan yang bermukim di Jawa (Carey, 1985:21).

Perkawinan campur ini antara lain disebabkan perantau-perantau Cina yang datang ke Indonesia pada umumnya tanpa perempuannya (istrinya). Mereka pada awalnya masih merencanakan kembali ke negeri Cina apabila mereka telah mengumpulkan kekayaan yang cukup banyak untuk hari tuanya, tetapi lama kelamaan mereka meninggalkan gagasan untuk kembali ke tanah asalnya. Mereka kemudian malah hidup dengan perempuan setempat dan menetap di Indonesia untuk selama lamanya. Mereka membentuk komunitas sendiri yang makin lama makin berbeda secara kultural dengan masyarakat leluhur mereka (Cina), maka terbentuklah sebuah kelompok yang dalam banyak tulisan tentangnya disebut sebagai golongan peranakan (Gondomono, 1996:2-3).

Perempuan-perempuan Cina tidak ikut bermigrasi ke Indonesia dalam jumlah yang berarti sampai menjelang abad ke-20. Menurut penulis-penulis Cina dari Indonesia, hal ini disebabkan pelayaran dengan junk sangat berat bagi wanita, perjalanannya memakan waktu lama dan ongkos kapal sangat tinggi, tetapi yang penting pula menyangkut masalah tradisi, yang melarang wanita terhormat untuk mengadakan perjalanan ke seberang lautan. Mereka yang sudah kawin harus tinggal bersama mertuanya (Wilmott, 1960:18), dan perempuan Cina yang belum kawin pun tidak ada yang bermigrasi kecuali mereka yang dibeli dan diambil sebagai pelacur (gundik). Dalam banyak kasus, migrasi secara illegal masih berlangsung sampai tahun 1894 dan Undang-Undang yang ditetapkan lebih menekankan pada wanita daripada pria. Selain itu meskipun mereka telah mempunyai keluarga di tempat asalnya, kebanyakan dari mereka mengambil wanita pribumi sebagai istri kedua atau gundik (Copples, 1994:22). Konsekwensinya anak-anak mereka kemudian dididik dengan tradisi ibu mereka, maka bisa dikatakan mereka harus beradaptasi dengan tradisi setempat, dan kemudian mereka harus juga menyesuaikan dengan budaya kolonial, sehingga sebelum akhir abad ke-19 mereka menganut budaya lokal kolonial (Wilmott, 1960:18). Blusse menyebut percampuran budaya ini dengan *strange culture* (Blusse, 1986) Adanya bentuk budaya yang aneh ini yang merupakan campuran antara budaya Cina dengan budaya lokal dan kolonial menunjukkan bahwa telah terjadi adaptasi yang kemudian menyebabkan adanya asimilasi kultural antara ketiga unsur budaya tersebut. Namun pada akhir abad ke-19 terjadi perubahan orientasi budaya di kalangan etnis Cina.

Pembubaran VOC pada akhir abad ke-18 (1795) sebenarnya juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Cina di tempat-tempat yang kemudian menjadi wilayah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan khusus terhadap etnis ini. *Regerings Reglement* 1854 (Kompas, 1995) mencantumkan

ketentuan yang memisahkan antara satu etnis dengan etnis lainnya. Penggolongan etnik dalam masyarakat Hindia Belanda menempatkan orang-orang Cina pada lapisan kedua setelah orang-orang Belanda dan Eropa lainnya, dan di atas lapisan ketiga yang ditempati orang-orang pribumi. Dari sistem ini, dalam kehidupan sosial di mana saja orang-orang Belanda dan Eropa menerapkan perbedaan dan pemisahan terhadap lapisan di bawahnya. Dalam sistem pemerintahan misalnya, pemerintah Belanda membentuk dua jalur yaitu pemerintahan kolonial yang diperuntukkan bagi warga Belanda, Eropa serta orang-orang Timur Asing, dan yang lain adalah pemerintahan Pamong Praja untuk orang-orang pribumi.

Segregasi kolonial Belanda ini berhasil menciptakan jarak dalam pergaulan alamiah sehari-hari penduduk nusantara. Proses alamiah seperti kawin campur pun menjadi persoalan rumit pada masa itu, sehingga proses alamiah seperti hubungan cinta antar insan berbeda latar belakang suku bangsa dan agama pun sering terganjal kebijakan ala *apartheit*. Dalam novel *Bunga Roos dari Tjikembang* (1927) karangan Kwee Tek Hoay digambarkan tentang hubungan cinta mendalam seorang pria Cina dengan perempuan Sunda yang tidak lazim pada saat itu. Novel yang menurut Myra Sidharta terinspirasi karya Shakespeare, *A Midsummer Night Dream*, tersebut menggambarkan dengan jelas ketulusan cinta dan interaksi antar golongan masyarakat yang melanggar kelaziman masa kolonial (Santosa, 2012:155).

Tonggak sejarah yang lain yang menandai perubahan orientasi bagi orang-orang Cina adalah peristiwa-peristiwa berdarah di masa lalu. Pada tanggal 23 September 1825, selama bulan-bulan pertama Perang Jawa (1825-1830), suatu kesatuan pasukan berkuda di bawah pimpinan Raden Ayu Yudakusuma, putri Sultan pertama Yogyakarta, melakukan penyerbuan atas Ngawi, sebuah pos perdagangan yang penting sekali artinya, yang terletak di tepi sungai Sala. Pos perdagangan tersebut merupakan tempat pemukiman bagi sejumlah cukup banyak penduduk bangsa Cina, yang terutama terdiri atas para dalal beras, pedagang-pedagang kecil serta para kuli, yang untuk sementara waktu membengkak jumlahnya, akibat masuknya para pengungsi dari desa-desa di sekitarnya (Carey, 1974:7).

Pasukan Raden Ayu Yudakusuma melakukan pembantaian di pemukiman tersebut, tanpa menghiraukan jerit tangis orang-orang perempuan dan anak-anak yang memeluk. Semua orang Cina di Ngawi dibunuh. Tindakan itu begitu mengerikan. Pembantaian ini bukan satu-satunya peristiwa, karena di seluruh Jawa Tengah serta di sepanjang sungai Sala, adegan-adegan yang demikian dilakukan secara berulang ulang, ketika kelompok-kelompok masyarakat Cina yang terisolir diserang dan orang-orang yang berhasil selamat, melarikan diri ke kota-kota yang ada kesatuan-kesatuan tentara Belanda dan tempat-tempat pemukiman orang-orang Cina, yang terletak di pantai utara pulau Jawa yang dipandang relatif lebih aman, bahkan koloni-koloni masyarakat Cina yang sudah mapan pun, misalnya penduduk penenun Juwana, yang berjumlah 800 jiwa, yang terletak di sebelah timur Bagelen, harus pula dikosongkan serta banyak penjaga gerbang tol (bandar) yang dibunuh (Carey, 1986:8). Dampak dari *rudapaksa* pada orang-orang Cina adalah munculnya perasaan kecurigaan yang mendalam terhadap orang Jawa, dan ini dibalas pula dengan sikap yang sama oleh orang-orang Jawa.

Pangeran Dipanegara sendiri memberikan contoh dengan melarang komandan-komandannya, untuk berhubungan akrab dengan orang-orang Cina, bahkan secara khusus melarang mereka meminta perempuan-perempuan Cina peranakan untuk dijadikan gundik-gundik, karena dia memandang tindakan itu membawa malapetaka. Hal ini dikarenakan dari pengalaman hubungan dengan gadis Cina yang menyebabkan kekalahannya pada tahun 1826. Sikap-sikap yang demikian itu nampaknya mudah difahami, karena bagaimana pun juga orang-orang Cina telah memainkan peranan penting dalam bidang ekonomi, mereka sebagai mandor-mandor, pedagang-pedagang eceran candu serta orang-orang yang meminjamkan

uang. Hal ini berlaku juga selama periode Tanam Paksa (1830-1870).

Akibat dari Perang Jawa (Perang Diponegoro 1825-1830), pada waktu Perang Jawa ini berlangsung dengan sengitnya, orang-orang Cina semakin termotivasi untuk menjauh dari masyarakat pribumi dan mereka semakin tidak tertarik untuk mengidentifikasi diri mereka dengan penduduk asli. Hal ini sesungguhnya demi kepentingan keamanan dan perlindungan mereka, serta daya tarik yang diberikan yang berupa hak-hak istimewa berdasarkan undang-undang bangsa Eropa, sehingga pilihan mereka kemudian kembali ke dalam barisan-barisan utama kelompok masyarakat Cina (Carrey, 1974:22).

Perubahan orientasi budaya mencapai puncaknya tepatnya pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan perkembangan proses-proses tertentu di dalam masyarakat Cina yang menghalangi asimilasi sosial budaya dan perkawinan. Perempuan-perempuan Cina asli sejak itu mulai berdatangan di Jawa, maka kemudian banyak orang Cina peranakan yang kawin dengan perempuan Cina asli, sehingga anak-anak dari hasil perkawinan itu dididik menurut tradisi Cina daratan, baik dalam penggunaan bahasa, adat istiadat, maupun agama. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh Pemerintah Kolonial untuk memisahkan masyarakat Cina peranakan dari penduduk pribumi. Tindakan ini mengakibatkan sejak saat itu mulai berkembang tradisi asli Cina Daratan, dan secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan budaya lokal, sehingga sejak saat itu mulai jarang terjadi perkawinan dengan penduduk pribumi (Coppel:1994). Kondisi ini kemudian diperkuat oleh perlakuan Pemerintah Kolonial terhadap etnis Cina. Pemerintah Kolonial menempatkan orang-orang Cina dalam stratifikasi sosial masyarakat Hindia Belanda di atas masyarakat pribumi (Kompas:1995), sehingga di kalangan etnis Cina muncul perasaan superior, sebaliknya muncul perasaan benci di kalangan masyarakat pribumi, namun demikian meskipun perkawinan antara etnis Cina dengan pribumi memang berkurang, tetapi tidak berhenti secara mutlak.

Bukti bahwa perkawinan masih sering terjadi dapat diacu dari pernyataan Go Tjhuwing, seorang mantan guru di Sekolah Baperki di Kabupaten Situbondo, bahwa pada tahun 1923 ayahnya yang datang dari Tiongkok menikah dengan orang Madura (Winarni, 2010). Keluarga Suryanto (Siauw Hwie Tjong), pemilik Hotel Rosali demikian juga. Ia mengaku dilahirkan oleh seorang ibu yang berdarah campuran Cina Madura, karena neneknya adalah seorang perempuan Madura. Hendrikus Suwardi (Tjia Tjien Wad), Cina peranakan yang lahir dari seorang ibu Cina dan bapak keturunan Jawa (Winarni, 2010).

Perkawinan antaretnis juga terjadi di tempat lain. Menurut Tan Hoen Yap (82 tahun) (wawancara tanggal 15-11-2013), penjaga Klenteng Tri Dharama Tjoe Tik kiong, Tulungagung, bahwa perkawinan antara etnis Cina dengan pribumi sudah berlangsung sejak dulu. Saudara laki-lakinya dan saudara sepupunya, beberapa puluh tahun yang lalu menikah dengan orang Jawa, tetapi ia juga mengatakan bahwa jarang sekali perempuan Cina menikah dengan laki-laki pribumi. Hal ini menurut dia bukan karena fanatik, tetapi dalam kepercayaan orang Cina diyakini bahwa abu orang Cina lebih tua dibandingkan dengan orang Jawa. Sebab lain adalah ada sangkut pautnya dengan susunan kekerabatan. Orang Cina menganut sistem patriarkhat, dimana kekerabatan dirunut dari garis ayah, sedangkan jika perempuan Cina menikah dengan laki-laki pribumi berarti kekerabatan mereka ikut ayahnya (Jawa) misalnya. Keluarga lain adalah keluarga Nyah Legi. Tidak jelas siapa nama Cinanya, penduduk setempat memanggil dengan nama Cina Legi. Cina Legi ini sudah menikah beberapa puluh tahun yang lalu. Laki-laki Cina ini menikah dengan perempuan pribumi. keluarga-keluarga campuran tersebut hanya contoh dari perkawinan antara etnis Cina dengan pribumi, karena dalam kenyataan dilapangan dapat dimungkinkan perkawinan antaretnis ini banyak terjadi.

III. ASIMILASI DAN PERKAWINAN ANTARA ETNIS CINA DENGAN PRIBUMI DAN BERBAGAI PERSOALAN YANG MEINGKUPINYA

Parekh mengatakan (2008a) bahwa dalam masyarakat multikultural, perjumpaan antar kelompok bisa menimbulkan persoalan karena dua hal yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi, adalah keharusan bagi sebuah masyarakat untuk memiliki ikatan yang mantap dan stabil. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat memerlukan nilai-nilai budaya yang bisa menyatukan anggota-anggotanya, tetapi di sisi lain, tiap kelompok etnis memiliki keunikan nilai dan budayanya sendiri-sendiri.

Kondisi demikian kemungkinan akan menimbulkan permasalahan serius yang dihadapi Indonesia sebagai negara multikultural yaitu ancaman konflik antar suku bangsa maupun konflik antara pemerintah dengan kelompok suku bangsa tertentu. Sumber konflik ini seringkali berpangkal pada klaim bahwa ada golongan suku bangsa tertentu yang merasa lebih baik dan unggul dibandingkan dengan suku-suku bangsa lainnya. Hal ini ditambah dengan ketika proses pemanfaatan dan pendistribusian sumberdaya yang dimiliki negara berlangsung tidak adil. Kelompok dominan biasanya menjadi pihak yang paling diuntungkan, mengingat secara obyektif mereka memiliki infrastruktur dan akses yang lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada, selain juga karena klaim sepihak bahwa merekalah yang seolah-olah merasa paling berhak atas pemanfaatan sumberdaya tersebut (Afif, 2012:45). Ciri lain masyarakat multikultural adalah adanya kecenderungan di antara masing-masing suku bangsa untuk mengekspresikan identitas budaya mereka melalui cara-cara yang spesifik seolah-olah satu dengan lainnya tidak saling berhubungan. Kondisi ini jika ditampilkan secara terbuka tanpa ada kesediaan untuk saling mengakui dan menghargai, maka persaingan dan konflik sosial akan menjadi ancaman serius dalam praktik komunikasi antar budaya. Batas-batas kesukubangsaan menjadi lebih tegas, suku bangsa mayoritas akan semakin mendominasi suku bangsa minoritas melalui tindakan-tindakan yang acapkali diskriminatif (Afif, 2012:45).

Pemerintah Republik Indonesia sangat menyadari bahwa keterpisahan antara etnis Cina dengan etnis pribumi akan menimbulkan prasangka etnis yang bisa menjurus kepada konflik sosial, oleh karena itu sejak awal kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia telah menganjurkan pembauran (asimilasi) antara etnis Cina dengan etnis pribumi, termasuk asimilasi perkawinan. Anjuran pemerintah ini memotivasi beberapa tokoh Cina untuk memikirkan pemecahan problem minoritas tersebut. Bukti respon terhadap anjuran pemerintah adalah berdirinya Baperki, yang memandang bahwa etnis Cina sebaiknya berintegrasi ke dalam etnis pribumi dan diakui sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia. Sikap integrasionis Baperki ditunjukkan dengan mengambil peran aktif dalam mendirikan sekolah-sekolah Baperki, yang secara teoritis terbuka untuk semua orang Indonesia tanpa memandang ras. Organisasi tersebut juga mendirikan perguruan tinggi di Jakarta. Pada pertengahan tahun 1959 terlihat kecenderungan condong kepada ideologi tertentu yang menggiring pada pelaksanaan konsep tentang Nasionalis, Agama dan Komunis (NASAKOM), dengan makna yang sama seperti yang digunakan oleh PKI. Baperki memang secara teknis tidak memihak PKI, tetapi Baperki mengumpulkan dana untuk PKI dari pengusaha-pengusaha kaya Cina. Hal inilah yang mengakibatkan Baperki dianggap sebagai *underbow* PKI, sehingga pasca Peristiwa G 30 S PKI 1965 Baperki dianggap sebagai agen PKI (Copple, 1994:90).

Ide asimilasi sebenarnya bukan ide baru. Ide asimilasi di Indonesia sebenarnya secara politis sudah dicetuskan oleh Partai Tionghoa Indonesia (PTI) sejak tahun 1932. Partai ini didirikan dengan tujuan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Partai tersebut didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa radikal yang menentang kelompok nasionalis

Cina maupun *Chung Hwa Hui* yang pro Belanda, yang didukung oleh orang-orang Cina kaya. Program PTI ini adalah memperjuangkan status *dominion* untuk Indonesia dan kewarganegaraan tunggal bagi semua orang, tanpa melihat dari ras apa. Anggota partai ini terbatas bukan karena keradikalannya, tetapi karena partai tersebut terlalu maju untuk zamannya (Greif, 1991:7-8).

Kelompok lain yang berbeda pandangan dengan Baperki adalah Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang berdiri pada tahun 1963. Pendiri organisasi ini adalah sejumlah orang Cina peranakan yang beragama Kristen atau sering disebut golongan kanan yang membentuk kelompok sendiri dan telah mendeklarasikan Piagam Asimilasi pada tahun 1961. Orang-orang Cina peranakan ini bertekad untuk menjadi “orang Indonesia murni dan patriotik” seperti disebut pada Sumpah Pemuda tahun 1928, untuk mewujudkan satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Dalam pandangan mereka, untuk menjadi “Orang Indonesia yang murni dan patriotik” orang Cina lokal harus dilebur ke dalam penduduk Indonesia asli, sehingga kaum minoritas Cina tidak lagi menjadi suatu kelompok tersendiri. Mereka juga menganjurkan mayoritas orang Indonesia untuk menerima “keinginan alamiah tersebut serta membantu berlangsungnya proses asimilasi (Suryadinata, 2002:50).

Tokoh yang mempolopori kelompok ini adalah Lauwchuantho (Lauw Chuan Tho: kemudian setelah masuk Islam ganti nama Junus Jahja), seorang ahli ekonomi berpendidikan Rotterdam. Ia beranggapan bahwa apabila kaum minoritas Cina tetap merupakan kelompok sendiri (Junus Jahja menyebut kasta), mereka akan terus menerus menjadi obyek diskriminasi. Junus Jahja memandang bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan diskriminasi adalah melalui asimilasi ke dalam penduduk Indonesia. Ia menyangkal pandangan yang mengatakan bahwa situasinya belum matang untuk proses asimilasi karena masih ada peraturan yang mendiskriminasi orang Cina dengan mengemukakan cara menghilangkan diskriminasi (Suryadinata, 2002:50).

Alasan yang lebih rinci dikemukakan oleh Ong Hok ham (Onghokham). Pada waktu itu dia seorang mahasiswa (program doktor) yang berpengaruh di Jawa. Ia berpendapat bahwa pemisahan diri orang-orang Cina sering disebabkan oleh kaum minoritas sendiri, yang mempertahankan identitas kelompok yang eksklusif. Ia memandang bahwa, halangan-halangan dari mayoritas di Indonesia ini sedikit sekali dan kesukaran terbesar terletak pada minoritas. Rintangan-rintangan di Indonesia, seperti agama, adalah kecil. Prasangka warna kulit dan ciri-ciri rasial hampir tidak ada. Rintangan-rintangan lain seperti adat-istiadat, larangan-larangan beberapa makanan haram dan lain-lain semakin tidak terasa di kota-kota dan juga hal-hal ini bukan merupakan hambatan besar dalam berasimilasi (Suryadinata, 2002:51).

Ong juga mengatakan bahwa pemerintah mungkin merencanakan untuk menerapkan program asimilasi orang-orang Indonesia keturunan Cina ke dalam masyarakat mayoritas dengan cara tidak menganggap minoritas sebagai suatu kelompok tersendiri, dengan mendirikan sekolah campuran, dan juga dengan cara menganjurkan kaum minoritas Cina untuk mengubah nama-nama mereka menjadi nama Indonesia. Ong berpendapat bahwa langkah yang dilakukan menuju persatuan amatlah penting. Persatuan ini dapat dicapai melalui asimilasi, sehingga sifat eksklusif kaum minoritas akan lenyap dan hubungan antara minoritas dan mayoritas menjadi lebih baik, selanjutnya akan bertambahlah perkawinan campuran. Cara demikian menurut Ong, menyebabkan asimilasi mudah tercapai, baik secara biologis, ekonomis, sosial, politis maupun budaya (Suryadinata, 2002:52).

Ide Asimilasi tersebut akhirnya tidak hanya sebagai respon dari orang-orang Cina tertentu, tetapi untuk menyelesaikan permasalahan etnis Cina ini, Presiden Suharto menjalankan kebijakan asimilasi total terhadap orang-orang Cina. Baperki dibubarkan sebab

dilihat sebagai instrumen dari Partai Komunis untuk memisahkan orang Cina dari pribumi. Kebijakan asimilasi total ini memaksa orang Cina untuk menghilangkan segala bentuk identitas, budaya dan tradisi mereka, yang diterapkan pada seluruh aspek kehidupan berbangsa, misalnya aksara Cina dilarang, termasuk impor, mengedarkan, memperjualbelikan barang yang memakai aksara Cina. Pendidikan yang berbahasa Cina juga dilarang (Darmawan, 2014:4).

Kebijakan asimilasi pada zaman Orde Baru bisa dibilang berdampak kuat, secara sosiokultural, dampak asimilasi terhadap orang-orang Cina di Indonesia juga sangat kuat. Orang-orang Cina yang berusia di bawah 40 tahun kehilangan identitas Cina mereka. Sebagian besar dari mereka yang termasuk kategori ini tidak mampu berbahasa Cina, merasakan diri mereka sebagai orang Indonesia, dan baru kemudian sebagai orang Cina (Dawis 2010:117, Darmawan, 2014:6). Bagaimana dengan asimilasi perkawinan?

Program asimilasi dalam operasionalnya pada zaman Orde Baru didukung dengan peraturan-peraturan yang bisa menggiring orang-orang Cina agar membaaur dengan masyarakat mayoritas. Peraturan-peraturan penting yang berkaitan dengan asimilasi adalah: (1) Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, tentang peraturan ganti nama bagi WNI keturunan Cina; (2) Inpres No.14/1967, pembatasan terhadap perayaan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina (Barongsai, Arak-arakan, *Tua Pekong*, *Liong* dan *Peh Cun*); (3) Kep.Menperindagkop No 386/KP/XII/1978, tentang larangan mengimpor, memperdagangkan, dan mengedarkan semua jenis barang cetakan dalam huruf/aksara dan Bahasa Cina (Mely G.Tan,1983:114). Khusus tentang asimilasi perkawinan belum diatur dengan peraturan tersendiri, tetapi pada tahun 1960, pemerintah Indonesia masih memperbolehkan pernikahan lintas etnis yang berbeda agama. Akan tetapi, pada zaman sekarang, pemerintah tidak memperbolehkan dengan ketetapan undang-undang perkawinan No.12 Tahun 1974. Dengan demikian perkawinan antar etnis yang berbeda budaya dan tradisi tidak dilarang, namun harus selaras agamanya. Perkawinan silang lintas etnis dan agama ini merupakan kecenderungan untuk saling mengakomodasi dan menjembatani perbedaan latar belakang individu agar menjadi bagian dari kelompok dominan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Berscheid dan Ammazalorso (2004), bahwa hubungan sosial yang lebih erat antara ke dua etnis karena pertama adanya interaksi sosial. Interaksi sosial memungkinkan individu-individu yang terlibat dalam interaksi tersebut lebih bisa saling mengenal satu sama lain, sehingga kerjasama akan lebih mudah terbangun. Kedua, adanya kedekatan. Kedekatan ini akan tercipta ketika pihak-pihak yang berinteraksi memersepsi adanya kesamaan-kesamaan unsur pembentuk identitas mereka. Persamaan identitas ini selanjutnya akan mempermudah mereka untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tertentu dalam interaksi sosial. Ketiga, adanya kedekatan emosi. Setiap hubungan sosial yang dekat selalu mensyaratkan adanya ikatan emosional yang kuat antara pihak-pihak terlibat. Kondisi ini dicirikan oleh adanya kebangkitan (*arousal*) ketika mereka dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang dapat mengundang sensitivitas dan keterlibatan untuk bertanggungjawab terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut.

Perkawinan antara etnis Cina dengan pribumi bila mengacu pada tiga syarat tersebut, syarat kedua lebih cocok untuk melihat perkawinan campur tersebut, yaitu kedekatan yang terbentuk akibat persamaan identitas diantara mereka. Kesamaan Identitas ini terutama kesamaan identitas agama. Identitas sebagai seorang Islam atau agama lain misalnya. Kesamaan agama ini akan lebih memudahkan terjadinya perkawinan antar etnis. Konversi dalam hal agama orang-orang Cina ini banyak terjadi pada zaman Orde baru. Konversi agama tidak hanya terjadi dari Konghucu menjadi agama Budha, serta agama Kristen (Katolik dan

Protestan) melainkan juga pada agama Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa Perkawinan campur antara etnis Cina dengan Orang pribumi pada zaman Orde Baru semakin sering terjadi. Perkawinan antar etnis kalau dulu yang sering terjadi adalah antara laki-laki Cina dengan perempuan Madura, namun di kemudian hari (zaman Orde Baru) sudah ada perempuan etnis Cina keturunan yang kawin dengan laki-laki pribumi padahal kejadian semacam ini dulu langka terjadi. Hal ini disebabkan sudah berubahnya pandangan di lingkungan masyarakat Cina tentang perkawinan. Generasi tua yang pada umumnya dulu menganggap tabu perkawinan antara perempuan Cina dengan laki-laki pribumi yang menurut tradisi Cina dianggap lebih muda daripada etnis Cina, lama kelamaan sudah mengalami pergeseran. Mereka memang masih menganjurkan perkawinan sesama etnis, namun apabila tidak dipatuhi oleh anak-anak mereka, mereka tidak memperlmasalahkannya. Generasi mudanya rupanya juga sudah mempunyai pandangan lain tentang perkawinan mereka (Wawancara dengan Endang S, Karyawan Universitas Jember tanggal 3 Juni 2006).

Bambang Kurniawan (Chien Sik Tjhen) mengatakan bahwa perkawinan campur sebenarnya sejak dulu tidak lagi masalah bagi orang-orang Cina, bahkan sekarang banyak sekali yang menikah dengan orang pribumi. Laki-laki Jawa ada yang menikah dengan perempuan Cina. Orang tua zaman sekarang sudah memberikan kebebasan anaknya memilih jodohnya sendiri, namun menurutnya, kendala yang sering menjadi masalah jika berbeda agama (Wawancara dengan Bambang Kurniawan, 27 Mei 2013).

Perkawinan karena berlatar belakang kesamaan agama ini (Islam), misalnya perkawinan Han Hwie King, yang setelah masuk Islam telah memilih wanita pribumi asal Kebonsari Jember menjadi istrinya (Hudaya, 2014:66). Penjaga Klenteng TITD PAI LIEN SAN Jember Hasan Basri juga mengatakan bahwa sejak dulu sudah banyak orang-orang Cina di Jember yang menikah dengan pribumi (Jawa/Madura). Dia yang sudah memeluk Islam, juga menikah dengan perempuan pribumi. Anak-anaknya memeluk Islam dan sebagian menikah dengan pribumi. Pendiri Klenteng TITD PAI LIEN SAN, menikah dengan orang pribumi dari desa Panti Kecamatan Panti Jember, maka dari itu klenteng didirikan di Desa Panti (Wawancara dengan Hasan Basri, 27 Mei 2013). Mantan Rektor Universitas Jember yang beragama Katolik memperistri seorang perempuan Cina dari Jember, kemungkinan juga karena kesamaan agama. Ini hanya beberapa contoh perkawinan campur. Peneliti belum menemukan data/jumlah perkawinan campur antara orang Cina dengan pribumi. Data yang sudah sangat lama ditemukan yaitu data dari tahun 1998.

Tabel 1. Jumlah Kawin Campur Yang Sudah Dilakukan Oleh Etnis Cina Keturunan Tahun 1998

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Sumbersari	37
2	Kaliwates	75
3	Patrang	22

Sumber: Badan Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember 1998.

Perkawinan campur tidak jarang terjadi di Kabupaten Situbondo. Beberapa keluarga campuran sebagai contoh, yaitu keluarga Hendrikus Suwardi. Dia mengaku bapaknya keturunan Jawa (Cina Jawa), dan dia sendiri menikah dengan perempuan Madura. Suryanto (Siau Hwie Tjong) seorang pengusaha sukses, pemilik Hotel Rosali dan seorang kontraktor, mengaku bahwa kakeknya yang datang langsung dari Tiongkok menikah dengan perempuan Madura, orang tuanya menikah dengan Cina peranakan, dirinya sendiri menikah dengan Cina

asli, tetapi dia menamai anak-anaknya dengan nama Indonesia dan tidak menggunakan nama marga (nama Cina) (Winarni, 2009). Contoh lain Go Tjhuing seorang mantan guru Sekolah Cina (Sekolah Baperki) di Situbondo mengatakan bahwa ayahnya yang berasal dari Tiongkok pada tahun 1923 menikah dengan orang Madura. Saat ini ada beberapa keluarganya yang menikah dengan orang pribumi (Winarni, 2012:202). Pada saat ini semakin banyak terjadi perkawinan campur antara etnis Cina dengan pribumi.

Orang-orang Cina di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung sebagai contoh asimilasi perkawinan. Perkawinan antara orang-orang Cina dengan pribumi di kecamatan ini, terutama di Desa Bendosari dan Desa Ngantru sudah berlangsung lama. Pada sekitar tahun 1972-an, ketika peneliti menempuh pendidikan di SMP Ngantru, mempunyai beberapa teman yang Cina peranakan. Mereka ayahnya Cina, ibunya Jawa. Misalnya keluarga Cina Legi (nama terkenalnya) adalah keluarga campuran Cina dan Jawa. (observasi lapangan, Agustus 2013). Berdasarkan penuturan orang Cina sendiri belum banyaknya gadis Cina yang menikah dengan pribumi, alasannya adalah untuk mempertahankan marga, karena nama marga berasal dari pihak laki-laki (ayah). Contoh lain adalah keluarga Goleong. Anak laki-laknya yang bernama Bing menikah dengan gadis pribumi. Keluarga Tiong, salah satu anak laki-laknya juga menikah dengan gadis pribumi. Napsih, gadis pribumi dinikahi oleh laki-laki Cina. Jarangnya perempuan Cina kawin dengan pribumi laki-laki, sudah lama mulai luntur. Hal ini terbukti bahwa gadis Cina juga sudah banyak yang menikah dengan pribumi. Contohnya adalah anak perempuan Hwie, penjual jamu terkenal dari desa Bendosari Kecamatan Ngantru dinikahi Didik yang pribumi yang tidak lain adalah pegawainya di toko tersebut (Penelitian lapangan: Agustus 2013). Anak Sulung Hwie yaitu Cong Yang menikah dengan Tipuk tetangganya sendiri. Masih banyak contoh lain yang tidak bisa disebut satu persatu.

IV. DAMPAK PERKAWINAN ANTARETNIS TERHADAP KEHIDUPAN BUDAYA DAN TRADISI

Akibat perkawinan dengan penduduk pribumi yang ternyata tidak bisa dihindari, menyebabkan terbentuknya generasi baru dari ras campuran. Perkawinan campur antara orang Cina dengan orang lokal bertujuan agar orang-orang Cina dapat menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang tidak harus dimusuhi dan dipersalahkan, namun demikian masih ada kendala yang menghambat perkawinan antar etnis ini. Beberapa informan pribumi mengaku bahwa mereka kurang *sreg* jika anaknya menikah dengan orang Cina. Perkawinan itu perlu dihindari jika bisa. Mereka mengatakan bahwa faktor budaya yang menyebabkan mereka berfikir dua kali untuk menikahkan anaknya dengan seorang Cina. Mereka memiliki budaya yang berbeda dengan orang pribumi, maka menurut mereka akan ada kemungkinan anak-anak mereka akan terkucil jika berkumpul dengan keluarga suaminya. Hal sebaliknya yang terjadi pada orang-orang Cina adalah masalah agama. Perbedaan keyakinan menyebabkan mereka tidak menikah dengan orang pribumi.

Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses asimilasi menyebabkan adanya upaya-upaya mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara perseorangan atau kelompok manusia. Usaha mengurangi perbedaan ini dilakukan menyebabkan peningkatan kesatuan perilaku, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Bila individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok orang atau masyarakat, berarti budaya individu dalam kelompok itu melebur menjadi satu. Setelah itu lahir kebudayaan baru. Proses peleburan itu biasanya diikuti oleh pertukaran unsur-unsur budaya. Pertukaran tersebut bisa terjadi jika suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya. Harowitz (1981:115) mengatakan bahwa asimilasi dapat dianggap sebagai suatu perubahan identitas. Perubahan itu terjadi jika dua atau lebih

kelompok etnik saling berinteraksi. Perubahan identitas ini dapat berupa penyempitan atau peleburan batasan etnik. Proses peleburan batasan-batasan (*boundariest*) identitas etnis yang terjadi menandai adanya masing-masing kelompok etnik yang mungkin mengalami perubahan. Dalam konteks ini Harowitz menyebutnya sebagai *proces of ethnic fusion and fission*.

Proses asimilasi dengan demikian menyebabkan berakhirnya kebiasaan lama dan menerima kehidupan baru. Kelompok atau individu dalam proses ini mengalami pengintegrasian proses belajar, yaitu belajar peraturan-peraturan formal, yang merupakan landasan norma-norma masyarakat yang akan dimasuki. Fase asimilasi dengan intensitas integratif normatif akhirnya tercapai, yang pada gilirannya akan tercipta kesamaan selera, norma dan kepentingan-kepentingan. Integrasi oleh individu atau kelompok pendatang terwujud saja tidak cukup, sebaliknya peran kelompok penerima tetap harus diperhitungkan. Kelompok penerima diharapkan bisa memunculkan pengakuan bahwa individu atau kelompok pendatang sudah lama bergaul dengan dirinya, sehingga mereka dianggap sebagai anggota dalam kelompok (*in group*). Asimilasi dengan demikian dapat dikatakan sebagai proses dua arah, di satu pihak (dari segi pendatang) adalah penetrasi dan ditinjau dari segi kelompok penerima ialah proses pengakuan. Demikian halnya dengan asimilasi perkawinan.

Asimilasi tidak hanya menyebabkan perubahan secara fisik, tetapi juga perubahan tradisi perkawinan. Bagi orang Cina secara tradisi masalah perkawinan ada kaitannya dengan pranata. Dalam hal ini perkawinan merupakan urusan dan untuk kepentingan orang tua serta keluarga, dan sama sekali bukan karena keinginan, apalagi persetujuan, dua muda-mudi yang akan menikah sendiri. Keinginan atau pendapat para muda-mudi itu tidak perlu dipertimbangkan oleh orang tua. Perkawinan sering dianggap sebagai “mengambil dan memperoleh menantu perempuan”, dipandang dari kepentingan keluarga calon mempelai laki-laki, dan sekali lagi, bukan untuk memperoleh jodoh atau teman hidup seseorang. Anggapan ini menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah demi kepentingan keluarga mempelai laki-laki, yaitu untuk memperoleh anak laki-laki agar bisa meneruskan garis keturunan keluarga (Gondomono, 2013:200). Tradisi ini lama-lama mengalami erosi karena dengan perkawinan antar etnis menyebabkan perubahan sudut pandang tentang perkawinan, jika semula perkawinan secara tradisi untuk kepentingan keluarga, berubah secara perlahan menjadi kepentingan anak (individu), sehingga bisa dikatakan perubahan dari kolektivistis menjadi individualistis.

Dampak lebih lanjut dari perkawinan antar etnis adalah terancamnya budaya dan tradisi dari masing-masing etnis, bahkan terjadi penyempitan budaya dan tradisi masing masing etnis, terutama yang minoritas. Hal ini disebabkan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut kemudian hidup menurut budaya dan tradisi ibunya, misalnya menyangkut bahasa, cara berpakaian, pola kehidupan sehari-hari, pola makan dan lain-lain. Ada kalanya budaya dan tradisi itu melebur jadi satu dan terjadilah akulturasi antara budaya etnis Cina dengan budaya pribumi.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara orang-orang Cina dengan orang-orang pribumi sudah berlangsung lama, yaitu sejak awal-awal kedatangan orang-orang Cina di Jawa. Hal ini terbukti bahwa pada zaman Majapahit sudah terjadi perkawinan dengan antara orang-orang Cina dengan pribumi, meskipun perkawinan silang yang terjadi terbatas di keluarga kelas atas. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan silang bukan merupakan hal tabu.

Jika perkawinan silang ini sudah terjadi dalam keluarga elite, dapat diduga bahwa perkawinan silang ini juga terjadi pada masyarakat kebanyakan (masyarakat biasa), karena seperti disebutkan dalam berbagai literatur bahwa pada zaman Majapahit sudah ada komunitas Cina di kerajaan ini.

Pada masa-masa selanjutnya asimilasi perkawinan ini masih terus berlangsung, meskipun mengalami pasang surut. Hal ini bisa dilihat dari proses perkawinan silang di masa lalu, misalnya pada zaman VOC cenderung ada tren perkawinan silang antara orang-orang Cina dengan pribumi, tetapi menjelang akhir abad ke XIX terjadi penurunan. Hal ini disebabkan pada akhir abad XIX sampai awal abad XX sudah banyak perempuan-perempuan Cina yang dating di Jawa. Sebab lain karena adanya perubahan orientasi oplitik dan budaya orang-orang Cina. Karena semakin kuatnya kedudukan Belanda di Jawa, maka mereka lebih suka beradaptasi dengan pemerintah colonial daripada dengan penguasa pribumi. Demikian dengan zaman Indonesia merdeka. Tren kenaikan perkawinan silang terjadi pada zaman Orde Baru, karena asimilasi bukan lagi merupakan peristiwa alami tetapi sudah diformalkan dengan kebijakan pemerintah RI.

Asimilasi perkawinan tidak hanya menyebabkan perubahan secara fisik, tetapi juga perubahan tradisi perkawinan. Menurut tradisi perkawinan ada kaitannya dengan pranata. Bagi orang Cina secara tradisi masalah perkawinan ada kaitannya dengan pranata. Perkawinan dalam budaya orang Cina merupakan urusan dan untuk kepentingan orang tua serta keluarga, dan sama sekali bukan karena keinginan, apalagi persetujuan, dua muda-mudi yang akan menikah sendiri. Keinginan atau pendapat para muda-mudi itu tidak perlu dipertimbangkan oleh orang tua. Perkawinan sering dianggap sebagai “mengambil dan memperoleh menantu perempuan”, dipandang dari kepentingan keluarga calon mempelai laki-laki, dan sekali lagi, bukan untuk memperoleh jodoh atau teman hidup seseorang. Tradisi ini lama-lama mengalami erosi karena dengan perkawinan antar etnis menyebabkan perubahan sudut pandang tentang perkawinan, jika semula perkawinan secara tradisi untuk kepentingan keluarga, berubah secara perlahan menjadi kepentingan anak (individu), sehingga bisa dikatakan perubahan dari kolektivistis menjadi individualistis.

Dampak lebih lanjut dari perkawinan antar etnis adalah terancamnya budaya dan tradisi dari masing-masing etnis, bahkan terjadi penyempitan budaya dan tradisi masing masing etnis, terutama yang minoritas. Hal ini disebabkan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut kemudian hidup menurut budaya dan tradisi ibunya, misalnya menyangkut bahasa, cara berpakaian, pola kehidupan sehari-hari, pola makan dan lain-lain. Ada kalanya budaya dan tradisi itu melebur jadi satu dan terjadilah akulturasi antara budaya etnis Cina dengan budaya pribumi.

B. Saran

Asimilasi perkawinan merupakan asimilasi tingkat tinggi, karena dengan asimilasi perkawinan bisa diharapkan terjadinya peleburan antaretnis, yang bisa berdampak pada luntarnya perbedaan-perbedaan dan mengikis syak wasangka antaretnis. Oleh karena itu saran terhadap pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan antaretnis tidak menyulitkan. Saran terhadap masyarakat agar lebih terbuka terhadap etnis yang berbeda, bersikap adil, tidak memelihara anggapan negatif terhadap etnis lain, saling menghargai, sehingga mengurangi kesalahfahaman dan konflik antaretnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A., (2012). *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*. Jakarta: Kepik.
- Agus Wijayanti, P., (2001). *Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*. Yogyakarta: Tarawang.
- Aziz, M., *Lasem Kota Tiongkok Kecil: Interaksi Tionghoa Arab dan Jawa dalam Silang Budaya Pesisir*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Badan Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember
- Berscheid, E&H. Ammazalorso, (2004). "Emotional Experience in Close Relationship," in Marilinn B. Brewer and Miles Hewstone (eds.). *Emotion and Motivation*, UK: Blackwell Publishing Ltd.
- Blusse, L., (1986). *Strange Company, Chinese Settlers, Mestizo Women and The Dutch in VOC Batavia*, Foris Publications, Dordrecht Holland/Riverton, U.S.A.
- Carey, P., (1985). *Orang Jawa Dan Masyarakat Cina (1755-1825)*, PT Pustaka Aset, Jakarta.
- Carey, P., (1974). "Changing Perceptions of Chinese Communities in Central Java, 1755-1825. *Indonesia*. No 37. April 1974.
- Coppel, C. A., (1994). *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, PT. Pustaka Aset, Jakarta.
- Darmawan, D., (2014). *Identitas hibrid Orang Cina*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Dawis, A., (2010). *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, Jakarta: Gramedia.
- Gondomono, (2013). *Manusia dan Kebudayaan Han*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____, (1996). *Membanting Tulang Menyembah Arwah, Kehidupan Kekotaan Masyarakat Cina*, Fakultas Sastra UI, Jakarta.
- Gordon, M. M., (1968). *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins*, Free Press, New York.
- Hariyono, P., (1994). *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Harowitz, D.L., (1985). *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley, Los Angeles. London: University of California Press.
- Hudaya, N., (2014). "Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Jember Pada Masa Reformasi Tahun 1998-1912. *Skripsi Pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Jember*.
- Idi, A., (2009). *Asimilasi Cina Melayu di Bangka*, Tiara Wacana Yogyakarta.
- Kompas, (1995). *Menjadi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Labovitz, S dan R Hagedorn, (1982). *Metode Riset Sosial*, Erlangga, Jakarta.
- Onghokham, (2009). *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Yogyakarta: Komunitas Bambu.
- Pires, T., (2014). *Suma Oriental: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Reid, A., (1992). *Southeast Asia in The Age of Commerce vol II*, New Haven: Yale University Press.
- Remmelink, W.G.J., (2002). *Perang Cina Dan Runtuhnya Negara Jawa 1725-1743*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Santosa, I., (2012). *Peranakan Tionghoa di Nusantara: catatan Perjalanan dari Barat Ke Timur*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suryadinata, L., (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia).
- _____, (1999). *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, LP3ES, Jakarta.
- _____, (1994). *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Tan, M.G., (1983). *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia, Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Winarni, R. dan Raharsono, L. S., (2009). *Ingin Menjadi Pribumi: Studi tentang Strategi Adaptasi Orang Orang Tionghoa dalam Bidang Politik, Sosial dan Budaya di Kabupaten Situbondo* (Jember: Laporan Penelitian)
- Winarni, R., (2010). “ Para Penguasa Cina di Ujung Timur Jawa: Studi Tentang Peranan Orang-Orang Cina dalam Bidang Politik dan Pemerintahan di Wilayah Eks Karesidenan Besuki Akhir Abad ke-18 Awal Abad ke-19” *Laporan Penelitian*.Jember: Lemlit Universitas Jember.
- _____, (2009). *Cina Pesisir: Jaringan Perdagangan Cina di Pesisir Utara Jawa Abad XVIII*. Kute: Pustaka Larasan, hlm. 161.
- W. Greif, S., (1991). *WNI: Problematik Orang Indonesia Asal Cina*. Jakarta: Grafiti Press.
- Wilmott, D. E., (1960). *The Chinese of Semarang: A Changing Minority in Indoneisia*, Cornell University Press, Ithaca, New York.